



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI**

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 ini. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Cimahi, 24 Juli 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI,**

Drs. YANUAR TAUFIK, MM

Pemuda Utama Muda

NIP. 19640121 199102 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang berisi rencana pembangunan tahunan daerah. Selain itu Undang-Undang ini mengatur keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, dalam rangka meningkatkan kinerja, melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, sehingga RPD Kota

Cimahi Tahun 2023-2026 dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

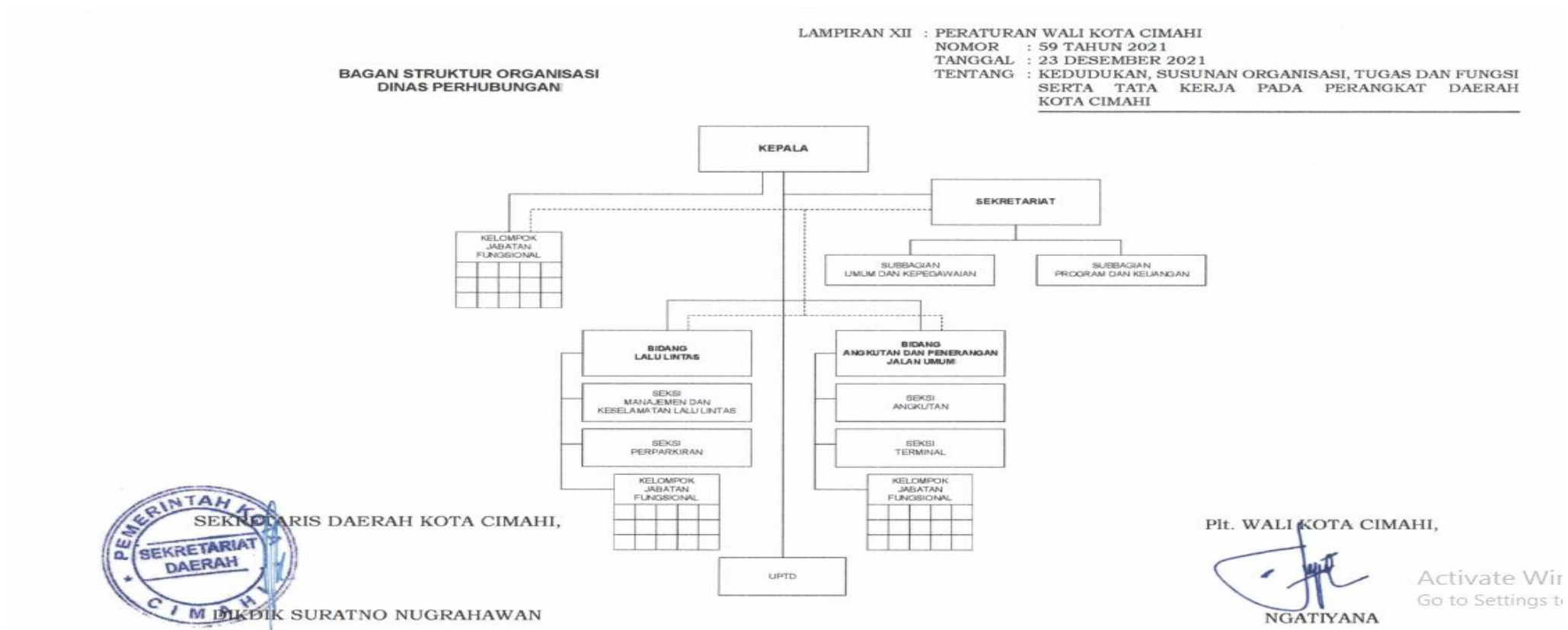
Dinas Perhubungan Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Pasal 91–Pasal 94), terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas;
 - a. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Perparkiran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum;
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Terminal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. UPTD; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 95 Lampiran XII, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.



1.1.3 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi didukung dengan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

- 1. PNS : 65 orang
- 2. THL : 68 orang
- Jumlah : **133 orang**

Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Tahun 2022
1.	IV c	-
2.	IV b	2
3.	IV a	2
4.	III d	7
5.	III c	4
6.	III b	7
7.	III a	6
8.	II d	25
9.	II c	10
10.	II b	5
11.	II a	-
12.	I d	1
13.	I c	-
14.	I b	-
15.	I a	-
JUMLAH		65

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik I - 7 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
10. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
11. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

12. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; I - 11
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
39. Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 37. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Daerah Provinsi Tahun 2018-2023; I - 14
 38. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kota Cimahi;
 39. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
 40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi;

41. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retibusi Jasa Umum;
43. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retibusi Jasa Usaha;
44. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retibusi Perizinan Tertentu;
45. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);
46. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 2 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
47. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288);
48. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
49. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Nomor 140)
50. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139)
51. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
52. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal;

53. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kendaraan Wisata Cimahi;
54. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 645);
55. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 551/Kep.1611 – Dishub/2019 tentang Jaringan Trayek Perkotaan;
56. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa umum;
57. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa usaha;
58. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini adalah Memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
- b. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- c. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Cimahi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cimahi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA CIMAHI

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN BPBD KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan realisasi kinerja pada Triwulan II pagu anggaran sebesar Rp. 32.295.570.276,- dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.768.925.403,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 39,54% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 43,87% seperti yang tertera pada Tabel 2.1. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) program dalam mendukung kegiatan : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dengan di dukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta 9 (sembilan) kegiatan teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan dalam mewujudkan Tujuan Dinas.

Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah di capai atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Triwulan II TA. 2022

A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 702.524.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.108.300,- dengan rata – rata pencapaian fisik 47,77% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 19,37%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.138.300.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.001.950,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 3,84 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 3,35%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.223.981.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.452.013.274,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 47,31 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 45,04%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 887.624.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 424.488.610,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 49,91% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 47,82%. Penyerapan anggaran masih

rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 537.045.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 272.990.492,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 52,47% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 50,83%.

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69.335.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.168.550,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 55,38% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 53,61%.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.270.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.570.702,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 55,66% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 45,63%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 568.977.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.768.068,-

dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 35,64% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 24,04%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 364.487.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.374.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 60,77% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 56,07%.

c. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.679.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.217.600,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 53,26% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,60%.

5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.447.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.103.300,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 53,92%.

6. Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLLA Di Jalan

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.165.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.954.600,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,09%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 252.387.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.132.245,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 53,37% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,56%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.576.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.329.100,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 50,20%.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.922.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.420.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 53,95% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 53,85%.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 151.973.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.410.550,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 1,63% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 1,59%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 140.120.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.091.100,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 28,65% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 23,62%.

8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.015.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.896.400,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 54,99% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 54,99%.

9. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.433.000,- dengan pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,94%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.116.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.958.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 83,48%.

e. Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.490.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 49,80%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.280.951.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 532.650.278,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 42,20% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 41,58%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

g. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.730.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 44,43% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 157.555.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.705.900,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 41,77% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 34,09%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 52.720.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.183.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 29,16% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 26,90%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.333.231.330,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.396.508.676,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 46,14% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 42,55%. Penyerapan

anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.775.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan IV.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.356.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.598.800,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 31,62% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 31,62%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 185.029.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.152.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 46,66% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 26,56%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.632.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 51,73% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,73%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.001.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.479.600,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 49,13%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.550.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.408.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 26,16% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 24,50%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 285.451.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.898.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 39,31% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 4,87%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.085.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 42% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 33,69%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 67% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 66,67%.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 174.996.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.175.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 51,91% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 36,10%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 204.992.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.179.276.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 87,46%.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 101.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.268.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,71%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.470.208.576,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.676.804.472,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 54,98% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 49,22%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 223.460.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.945.482,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 49,77% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 41,59%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 815.282.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.085.354,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 42,55% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 32,02%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.550.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 24.49% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 24.49%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2022 (sampai dengan triwulan II) dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II
Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN FISIK (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota			
1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	537.045.550,-	272.990.492,-	52,47
2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	702.524.000,-	136.108.300,-	47,77
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	69.335.600,-	37.168.550,-	55,38
4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	887.624.900,-	424.488.610,-	49,91
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
5	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	537.045.550,-	272.990.492,-	52,47
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	69.335.600,-	37.168.550,-	55,38
3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	299.270.000,-	136.570.702,-	55,66

4	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota			
8	Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	568.977.900,-	136.768.068,-	35,64
9	Sub Kegiatan Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	364.487.000,-	204.374.000,-	60,77
10	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.679.200,-	12.217.600,-	53,26
5	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten / Kota			
11	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	22.447.400,-	12.103.300,-	37,35
6	Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Laj Di Jalan			
12	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	23.165.350,-	22.954.600,-	100
13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	252.387.400,-	130.132.245,-	53,37
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.576.600,-	10.329.100,-	33,55

15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11.922.500,-	6.420.500,-	53,95
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
16	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.973.800,-	2.410.550,-	1,63
17	Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	140.120.300,-	33.091.100,-	28,65
8	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
18	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	98.015.900,-	53.896.400,-	54,99
9	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.000.000,-	0	

20	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	26.450.000,-	26.433.000,-	100
21	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000,-	0	0
22	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.116.000,-	15.958.500,-	100
23	Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000,-	2.490.000,-	49,80
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.280.951.870,-	532.650.278,-	42,20
25	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.400.000,-	11.730.000,-	44,43
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.555.500,-	53.705.900,-	41,77
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.720.400,-	14.183.000,-	29,16
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	10.333.231.330,-	4.396.508.676,-	46,14
4	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.775.300,00	0	0

5	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd	30.356.500,-	9.598.800,-	31,62
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185.029.200,-	49.152.000,-	46,66
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.632.000,-	5.500.000,-	51,73
8	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60.001.300,-	29.479.600,-	50
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.550.200,-	23.408.500,-	26,16
10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	285.451.500,-	13.898.500,-	39,31
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,-	8.085.000,-	42
12	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,-	4.000.000,-	67
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	174.996.000,-	63.175.000,-	51,91
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	204.992.000,-	179.276.000,-	100
15	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	101.575.000,-	100.268.000,-	100

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7.470.208.576,-	3.676.804.472,-	54,98
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000,-	92.945.482,-	49,77
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	815.282.000,-	261.085.354,-	42,55
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	39.000.000,-	9.550.000,-	24,49
	JUMLAH	32.295.570.276,-	12.768.925.403,-	39,54

2.1.2. Evaluasi pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d Triwulan II Tahun 2022

Sesuai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi terdiri dari 4 jenis retribusi daerah, dengan total target /rencana pendapatan sebesar Rp. **1.783.000.000,-** Dari rencana target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat merealisasikan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah sampai dengan triwulan II sebesar Rp. **786.088.510,-** atau mencapai **44,09%**. Adapun Rincian jumlah pendapatan yang telah direalisasikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kota Cimahi s/d Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,-	302.210.510,-	43,17
2	Retribusi Terminal	220.000.000,-	129.748.000,-	58,98
3	Retribusi Parkir On Street	850.000.000,-	347.980.000,-	40,94
4	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	13.000.000,-	6.150.000,-	47,31
	JUMLAH	1.783.000.000,-	786.088.510,-	44,09

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kota Cimahi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memahami bahwa tahun-tahun sebelumnya juga mengkaji capaian kinerja terkait SPM mengacu pada Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; serta Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; mulai dari RENJA Tahun 2018 tidak lagi mengkaji indikator SPM.

Hal tersebut mendasari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; sementara bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022 yang masuk ke dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Cimahi
yang masuk ke dalam RPJMD 2017 – 2022

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Realisasi Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan tingkat kelancaran dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	D (0,84)	D (0,84)	D (0,72)	C (0,72)	C (0,73)	C (0,72)	D (0,84)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,66)	Hasil TC baru akan dilaksanakan pada TW III TA 2022

Dari data tabel diatas diartikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan mengalami **Peningkatan** pada kategori **C**, akan dari target capaian yang telah di tetapkan. Dari target capaian sebesar **D** realisasi capaian menjadi **C** (0,66) sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi **Berhasil** meningkatkan tingkat kelancaran dan kenyamanan transportasi sesuai dengan tujuan pada IKK Misi 4 RPJMD 2017–2022.

Tabel 2.4
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS) TA 2020 Dan 2021

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2021
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	D	C	0,66

Tabel 2.5
Kenaikan atau Penurunan Pencapaian LOSS TA 2019 – TA 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja TA. 2018	Tahun 2020		Capaian Kinerja TA. 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja TA. 2021
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	D	D	0,84	C	C	0,72	C	C	0,66

Narasi analisis:

Berdasarkan rata-rata hasil traffic counting 15 Ruas Jalan Kota Cimahi untuk total 2 (dua) arah didapatkan LOS = 0,66 dengan tipe pelayanan C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan).

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pengukuran Kinerja didasarkan pada tingkat pelayanan yang dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Tipe pelayanan pencapaian kinerja, dihitung dengan rumus bahwa semakin kecil volume lalu lintas per kapasitas jalan maka realisasi menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan semakin baik. Perhitungan traffic counting 15 ruas jalan berada pada Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung pengukuran kinerja adalah :

Rata - rata LOS
15 Ruas Jalan

=

Jumlah LOS 15 Ruas Jalan

15

=

10,03

15

=

0,66

Data Pendukung

Tingkat Pelayanan

Batasan-batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu.

Adapun tingkat pelayanan (LOS) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

LOS = V/C

- LOS = Tingkat pelayanan jalan
- V = Volume lalu lintas (smp/jam)
- C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel 2.6
Karakteristik Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

Tabel 2.7
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)
15 Ruas Jalan di Kota Cimahi

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas	Kecepatan	Kepadatan	V/C	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7 = (5*6/4)	8	9
1.	Jl.Gandawijaya	Satu Arah	1395	26,37	43	0,81	D	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
2.	Jl. Pasar Atas	2/2 TT	1257	28,12	30	0,67	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
3.	Jl. Sriwijaya	4/2 TT	2759	38,62	38	0,53	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU

4.	Jl. Warung Contong	2/2 TT	1285	36,02	25	0,70	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
5.	Jl. Pesantren	2/2 TT	2126	37,25	34	0,60	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
6.	Jl. Jati Serut	2/2 TT	2681	39,42	40	0,59	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
7.	Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	2/2 TT	2245	39,8	38	0,67	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
8.	Jl. Haji Noor	2/2 TT	1285	37,9	23	0,68	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT

9.	Jl. Sangkuriang	2/2 TT	2673	37,45	48	0,67	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT
10.	Jl. Daeng M Ardiwinata	2/2 TT	1953	38,32	33	0,64	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT
11.	Jl. Industri	2/2 TT	2145	38,48	40	0,72	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
12.	Jl. Mahar Martanegara	2/2 TT	2616	38,8	39	0,57	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
13.	Jl. Kerkof	2/2 TT	2145	38,5	38	0,68	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
14.	Jl. Sadarmanah	2/2 TT	1313	37,8	26	0,75	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN dan JUMAT

15.	Jl. Kebon Kopi	2/2 TT	1996	35,82	42	0,75	D	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SELASA
JUMLAH						10,03		

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian V/C Rasio Thn 2020	Tahun 2021		Capaian V/C Rasio Thn 2021
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	C	C	0,72	C	C	0,66

Tahun 2020 realisasi tingkat pelayanan jalan (LOS) di Kota Cimahi adalah C dengan hasil nilai rata – rata V/C rasio sebesar 0.72. Pada tahun 2021 realisasi pencapaian tingkat pelayanan jalan (LOS) adalah C dengan realisasi V/C rasio sebesar 0.66. Melihat dari hasil realisasi tingkat pelayanan jalan (LOS) tahun 2020 dan tahun 2021 diperoleh nilai rata – rata tingkat pelayanan jalan sama yaitu **C** akan tetapi, realisasi nilai rata – rata V/C rasio tahun 2021 sebesar 0.66 **Lebih Baik** jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0.72. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemic Covid-19 dan penempatan petugas di beberapa titik kemacetan.

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak

sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (*Urban Mobility Plan*) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

Untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang positif dan lebih baik Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun program jangka panjang, menengah dan jangka tahunan
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan dan penerangan jalan umum, bidang perparkiran, pembinaan dan pengawasan transportasi
- c. Memberikan rekomendasi perizinan di bidang angkutan
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang lalu lintas, angkutan dan penerangan jalan umum guna keselamatan jalan
- e. Manajemen rekayasa lalu lintas
- f. Pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana jalan (rambu, marka, pagar, dan penerangan jalan umum)
- g. Memberikan rekomendasi ANDALALIN
- h. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis perhubungan tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan pengguna jasa transportasi.

- b. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya pelanggaran lalu lintas, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai.
- c. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi (terminal tipe C, halte dan gedung balai uji kendaraan bermotor) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Peningkatan profesionalisme aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Cimahi melalui peningkatan fasilitas pendukung kerja (sarana dan prasarana aparaturnya) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- e. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik ruas jalan dan penanganan titik parkir On Street di wilayah Kota Cimahi.

Isu Strategis Pembangunan Perhubungan meliputi isu strategis berupa informasi yang jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan masalah di masa datang, namun jika OPD bisa mengantisipasi akan menjadikan peluang/manfaat bagi OPD dan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan pada kurun waktu lima tahun mendatang.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Cimahi yaitu belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (pelayanan jalan).

Berdasarkan RPD Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 tentang urusan perhubungan, permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi :

- 1. Belum optimalnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan berupa marka, rambu dan guardrail.
- 2. Kondisi kendaraan umum yang memenuhi laik jalan belum optimal dari seluruh kendaraan wajib uji.
- 3. Belum optimal sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dan sesuai standar prosedur seperti terminal tipe C, halte, lahan parkir yang memadai, dan sarana prasarana perhubungan lainnya.

4. Laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas jalan.
5. Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan Perhubungan.

Berdasarkan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka isu strategis yang ditentukan dalam upaya penyelesaian permasalahan urusan perhubungan meliputi :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan, sehingga terwujudnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan yang baik dan berkualitas serta memadai dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Cimahi.
2. Optimalisasi peralatan alat uji dan meningkatkan SDM pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan optimalisasi alat uji dan peningkatan SDM Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan laik jalan angkutan umum.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan peningkatan jumlah, kualitas, dan pengembangan teknologi sarana prasarana perhubungan.
4. Revitalisasi dan analisis kebutuhan guna penambah jumlah halte yang selaras dengan penambahan jumlah rasio ijin trayek, meningkatkan kualitas halte yang digunakan dalam melakukan pelayanan penumpang dan menambah jumlah halte sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilaksanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD Kota. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review

terhadap rencana kinerja tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review Renja tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Cimahi

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.681.404.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.681.404.460	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	191.295.600		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	191.295.600	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	142.938.600		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	142.938.600	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	48.357.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	48.357.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	10.657.554.360		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	10.657.554.360	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	10.591.999.860		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	10.591.999.860	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	18.753.750		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	18.753.750	

No	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 dokumen	46.800.750		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 dokumen	46.800.750	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140 Orang	409.698.550		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140 Orang	409.698.550	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3orang	41.442.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3orang	41.442.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 rang	368.256.550		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 rang	368.256.550	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	652.299.550		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	652.299.550	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	12 Bulan	10.650.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	12 Bulan	10.650.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	60.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	60.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	95.555.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	95.555.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	226.150.550		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	226.150.550	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	28.944.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	28.944.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	6.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	6.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	225.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	225.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	43 Unit	323.002.472		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	43 Unit	323.002.472	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	235.935.292		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	235.935.292	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	41 Unit	87.067.180		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	41 Unit	87.067.180	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	8.523.459.928		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	8.523.459.928	

No	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	8.299.999.928		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	8.299.999.928	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	223.460.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	223.460.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	924.094.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	924.094.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	885.094.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	885.094.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	39.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	39.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					9.389.707.540	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					9.389.707.540	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	5.167.439.900		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	5.167.439.900	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	400 Unit	2.550.000.000		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	400 Unit	2.550.000.000	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	38 Unit	524.824.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	38 Unit	524.824.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2203 Unit	1.220.000.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2203 Unit	1.220.000.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	57 Unit	872.615.900		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	57 Unit	872.615.900	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal tipe C yang dikelola	100 %	628.829.500		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal tipe C yang dikelola	100%	628.829.500	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit	559.482.500		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit	559.482.500	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Cimahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	69.347.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Cimahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	69.347.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan	294.169.000		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan	294.169.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Laporan	294.169.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Laporan	294.169.000	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	3 Kegiatan	1.192.024.100		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	3 Kegiatan	1.192.024.100	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	609.169.000		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	609.169.000	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	558.855.100		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	558.855.100	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	24.000.000		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	24.000.000	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	6 Dokumen	27.500.000		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	6 Dokumen	27.500.000	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	6 Dokumen	22.500.000		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	6 Dokumen	22.500.000	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	5.000.000		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	5.000.000	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	4 Kegiatan	97.837.600		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	4 Kegiatan	97.837.600	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	23.166.000		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	23.166.000	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	56.491.200		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	56.491.200	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	18.180.400		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	18.180.400	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	12.000.000		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	12.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Kendaraan	569.816.840		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Kendaraan	569.816.840	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	8 kendaraan	155.466.500		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	8 kendaraan	155.466.500	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15 Laporan	414.350.340		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15 Laporan	414.350.340	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	25.984.600		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	25.984.600	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	25.984.600		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	25.984.600	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	4400 Kendaraan	1.374.106.000		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	4400 Kendaraan	1.374.106.000	
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8 Unit	50.000.000		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8 Unit	50.000.000	
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9167 Kendaraan	26.500.000		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9167 Kendaraan	26.500.000	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4400 Dokumen	110.000.000		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4400 Dokumen	110.000.000	
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	19.150.000		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	19.150.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Caoaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Caoaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	5.000.000		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	5.000.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	1.137.056.000		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	1.137.056.000	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	26.400.000		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	26.400.000	
				TOTAL		31.071.112.000						31.071.112.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota baik rencana pembangunan tahunan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk dari masyarakat terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi bidang lalu lintas, dan bidang angkutan dan penerangan jalan umum, pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada forum Musrenbang telah terrealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

- Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU, PJL, dan PJG)
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas untuk keselamatan jalan (rambu, marka pagar jalan dan perlengkapan jalan lainnya)
- Kelancaran lalu lintas (rekayasa lalu lintas)
- Penataan perparkiran (on street dan off street).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2022 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi Nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005 - 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2019 - 2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I.

Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2019 - 2024. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2019 - 2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
 - c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
 - e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
 - f. Meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
 - g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.
3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- 1) Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3) Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan,terluar, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia;
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai Kota Cimahi yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah “Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan”, sedangkan Tujuan

yang terdapat pada RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2023-2026 diturunkan menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang hendak dicapai oleh adalah “Optimalisasi pelayanan transportasi darat yang aman, nyaman dan berkeselamatan”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, sasaran yang dimuat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu “Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas”, sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah “Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman, nyaman dan berkeselamatan”.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan 4 (empat) tahun ke depan disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan, dan Sasaran Tahun 2023

VISI/ MISI/ TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS	
[MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
[TUJUAN] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	
[SASARAN] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	
Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Services</i>)	C Predikat (0,72)

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan pembangunan kesatu dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023–2026 dengan strategi dan arah kebijakan seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023

No	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan	Optimalisasi manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan

3.4. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2023 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi diarahkan pada :

1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya.
2. Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan program/kegiatan pengadaan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, bimbingan dan penyuluhan (diperuntukkan bagi pengemudi, dan pemilik angkutan), pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji dan manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan serangkaian kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen keselamatan jalan.

4. Peningkatan pelayanan angkutan dengan serangkain program/kegiatan pengembangan dan pemenuhan trayek untuk interkoneksi jaringan angkutan.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan yang disusun selama 1(satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								31.071.112.000				32.502.112.000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21.681.404.460				22.555.378.500	
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								191.295.600				189.500.000	
2	15	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	BB Nilai	6 Dokumen	15 Dokumen	142.938.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	137.000.000
2	15	01	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	BB Nilai	9 Dokumen	15 Dokumen	48.357.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	52.500.000
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.657.554.360					10.869.000.000
2	15	01	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	66 Orang	12 Bulan	10.591.999.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	10.803.500.000
2	15	01	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	1 dokumen	12 Bulan	18.753.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	15.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	13 dokumen	12 Bulan	46.800.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	50.000.000
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								409.698.550				435.000.000	
2	15	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50 Nilai	3 orang	140 orang	41.442.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	50,50 Nilai	50.000.000
2	15	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50 Nilai	140 orang	140 orang	368.256.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionalitas ASN	50,50 Nilai	385.000.000
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								652.299.550				689.418.500	
2	15	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	10.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	10.650.000
2	15	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	95.555.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	95.555.000
2	15	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	226.150.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	268.213.500
2	15	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	28.944.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	24.000.000
2	15	01	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	6.000.000
2	15	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,25	12 Bulan	12 Bulan	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	225.000.000
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								323.002.472				295.000.000	
2	15	01	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Cimahi	77,25	2 Unit	43 Unit	235.935.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	245.000.000
2	15	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Cimahi	77,25	41 Unit	43 Unit	87.067.180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	50.000.000
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8.523.459.928				9.223.460.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,25	12 bulan	12 Bulan	8.299.999.928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	9.000.000.000
2	15	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,25	12 bulan	12 Bulan	223.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	223.460.000
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								924.094.000				854.000.000	
2	15	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,25	22 Unit	12 Bulan	885.094.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	815.000.000
2	15	01	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,25	56 Unit	12 Bulan	39.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,50	39.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								9.389.707.540				9.946.733.500	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								5.167.439.900				5.726.439.900	
2	15	02	2,02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	50 Persen	400 Unit	4 Kegiatan	2.550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	55 Persen	2.550.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	50 Persen	38 Unit	4 Kegiatan	524.824.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	55 Persen	1.224.824.000
2	15	02	2,02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	50 Persen	2203 Unit	4 Kegiatan	1.220.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	55 Persen	1.080.000.000
2	15	02	2,02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	50 Persen	57 Unit	4 Kegiatan	872.615.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	55 Persen	871.615.900
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							628.829.500				628.830.150		
2	15	02	2,03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Persentase terminal tipe C yang dikelola	Kota Cimahi	0,64	3 Unit	100 Persen	559.482.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	559.494.550
2	15	02	2,03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase terminal tipe C yang dikelola	Kota Cimahi	0,64	3 Unit	100 Persen	69.347.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	69.335.600
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							294.169.000				294.169.000		
2	15	02	2,04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan titik kemacetan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kota Cimahi	50 Persen	16 Laporan	1 Kegiatan	294.169.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan titik kemacetan	64 Persen	294.169.000
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota							1.192.024.100				1.188.700.100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kota Cimahi	50 Persen	11 Laporan	3 Kegiatan	609.169.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	609.169.000
2	15	02	2,06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kota Cimahi	50 Persen	14 Dokumen	3 Kegiatan	558.855.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	555.531.100
2	15	02	2,06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kota Cimahi	50 Persen	4 Laporan	3 Kegiatan	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	24.000.000
2	15	02	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								27.500.000				27.500.000	
2	15	02	2,07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	Kota Cimahi	50 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	22.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	22.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	Kota Cimahi	50 Persen	6 Laporan	6 Dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	5.000.000
2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								97.837.600				296.129.350	
2	15	02	2,08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit danPemantauan Terminal	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	83 Persen	1 Laporan	4 Kegiatan	23.166.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	23.165.350
2	15	02	2,08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	83 Persen	3 Laporan	4 Kegiatan	56.491.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	252.387.400
2	15	02	2,08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	83 Persen	4 Laporan	4 Kegiatan	18.180.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	20.576.600
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								569.816.840				282.098.100	
2	15	02	2,09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Kendaraan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar Kota	Kota Cimahi	0,64	8 kendaraan	8 Kendaraan	155.466.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	151.973.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar Kota	Kota Cimahi	0,64	27 Laporan	8 Kendaraan	414.350.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	130.124.300
2	15	02	2,11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								25.984.600				116.760.900	
2	15	02	2,11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	Kota Cimahi	0,64	12 Dokumen	1 Kegiatan	25.984.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	116.760.900
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1.374.106.000				1.374.106.000	
2	15	02	2,05	2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	8 Unit	4400 Kendaraan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	50.000.000
2	15	02	2,05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	9167 Kendaraan	4400 Kendaraan	26.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	26.500.000
2	15	02	2,05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	4400 Dokumen	4400 Kendaraan	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	1 Laporan	4400 Kendaraan	19.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	19.150.000
2	15	02	2,05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	2 Laporan	4400 Kendaraan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	5.000.000
2	15	02	2,05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	12 Unit	4400 Kendaraan	1.137.056.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	1.137.056.000
2	15	02	2,05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	83 Persen	4 Laporan	4400 Kendaraan	26.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	26.400.000
2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							12.000.000				12.000.000		
2	15	02	2,08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	83 Persen	2 Laporan	4 Kegiatan	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	86 Persen	12.000.000
TOTAL													31.071.112.000					32.502.112.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi dengan didukung fasilitas yang memadai. Program dan kegiatan yang disusun selama 1(satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan di bidang teknis Perhubungan untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 9.389.707.540,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan kesekretariatan dinas dalam mendukung kegiatan teknis perhubungan, untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 21.681.404.460,-.

5.1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Sesuai dengan usulan rencana kinerja kegiatan untuk tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai 2 Program 17 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan perhubungan baik teknis maupun urusan pendukung pemerintahan daerah. Dengan usulan pagu rencana kinerja sebesar Rp. **31.071.112.000,-** yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 seperti yang terlampir pada Tabel 3.3 diatas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas dengan prioritas pembangunan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

- a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023.

Namun demikian ruang lingkup Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 lebih diutamakan terhadap

berbagai program utama Dinas Perhubungan yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan baik mulai RPJMD sampai dengan Renstra yang merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi.

Cimahi, 24 Juli^o 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAH,**



Drs. YANUAR TAUFIK, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640121 199102 1 003